



Analisis Literatur Terhadap Peran Strategis Kebijakan Fiskal dan Struktur APBN dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional

Ayu Triani Huatagalung¹, Lokot Muda Harahap^{2*}, Agnes Mika Cristina Br. Manik³,
Stephen Malau⁴

¹⁻⁴ Program Studi Manajemen, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: lokotmudahrp@unimed.ac.id¹, ayuhuatagalung2306@gmail.com^{2*}, agnes31498@gmail.com³,
malaustephen5@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi: ayuhuatagalung2306@gmail.com²

Abstract. Fiscal policy is a fundamental macroeconomic instrument used by the government to manage stability and growth through the regulation of state revenues and expenditures. In practice, this policy requires the State Budget (APBN) as the primary operational tool to implement the national development vision systematically. This research aims to analyze in depth the strategic role of fiscal policy and the APBN structure in maintaining national economic resilience and enhancing social welfare. The research method employed is a qualitative approach with a literature study (library research), reviewing various contemporary scientific references, journals, and policy documents from the 2021-2026 period. The results indicate that the optimization of tax instruments and the efficiency of government spending are capable of creating a significant multiplier effect on economic activities. The APBN is proven to perform allocation, distribution, and stabilization functions integratively to mitigate the impacts of market inequality and global economic shocks. The conclusion of this study emphasizes that the synergy between sound fiscal planning and transparent, accountable budget management is an absolute prerequisite for creating inclusive and sustainable national development. Strengthening fiscal governance is essential to address the challenges of future economic dynamics.

Keywords: APBN; Economic Stability; Fiscal Policy; Social Welfare; State Budget.

Abstrak. Kebijakan fiskal merupakan instrumen makroekonomi fundamental yang digunakan pemerintah untuk mengelola stabilitas dan pertumbuhan melalui regulasi penerimaan serta pengeluaran negara. Dalam praktiknya, kebijakan ini memerlukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sarana operasional utama untuk mengimplementasikan visi pembangunan nasional secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran strategis kebijakan fiskal dan struktur APBN dalam menjaga resiliensi ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (*library research*), yang mengkaji berbagai sumber referensi ilmiah, jurnal, dan dokumen kebijakan mutakhir dalam periode 2021-2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi instrumen pajak dan efisiensi pengeluaran pemerintah mampu menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi. APBN terbukti menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara integratif untuk memitigasi dampak ketimpangan pasar serta guncangan ekonomi global. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara perencanaan fiskal yang matang dengan manajemen anggaran yang transparan dan akuntabel merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan tata kelola fiskal sangat diperlukan guna menghadapi tantangan dinamika ekonomi di masa depan.

Kata kunci: Anggaran Negara; APBN; Kebijakan Fiskal; Kesejahteraan Sosial; Stabilitas Ekonomi.

1. PENDAHULUAN

Stabilitas ekonomi nasional merupakan tujuan utama kebijakan ekonomi, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia karena menjadi syarat bagi pertumbuhan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan, dan daya saing global (Luange & Tiakoly, 2025). Untuk mencapainya, pemerintah menggunakan berbagai instrumen, khususnya kebijakan fiskal melalui APBN (Alfidyah, 2025). Pada sistem ekonomi yang kompleks, intervensi pemerintah

menjadi penting untuk mengarahkan aktivitas ekonomi melalui kebijakan fiskal sebagai instrumen utama pengelolaan makroekonomi (Hasanah et al., 2025). Kebijakan fiskal mencakup pengelolaan penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan negara yang berfungsi dalam alokasi, distribusi, serta stabilisasi ekonomi guna mendorong pertumbuhan dan mengendalikan inflasi (Mujasmara et al., 2023).

Kebijakan fiskal dijalankan melalui pajak, belanja negara, subsidi, dan bantuan sosial untuk mempengaruhi produksi dan konsumsi masyarakat (Huda et al., 2024). Menghadapi ketidakpastian global dan dampak pascapandemi, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan fiskal yang adaptif seperti stimulus ekonomi, peningkatan belanja, dan reformasi perpajakan (Ambarita & Siregar, 2025). APBN menjadi instrumen utama dalam pengelolaan sumber daya fiskal untuk mendukung sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Febriansyah et al., 2025). Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta mengurangi dampak negatif dari berbagai tekanan ekonomi eksternal. (Mustari & Rahmat, 2026 ;Syadza et al., 2021).

Manifestasi nyata dari keberlangsungan kebijakan fiskal suatu negara tercermin secara eksplisit dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan rencana keuangan tahunan yang memuat secara rinci sumber-sumber pendapatan negara serta rencana penggunaan dana tersebut untuk membiayai berbagai program pembangunan dalam satu tahun anggaran (Gumilar et al., 2025) (Surdikina et al., 2025). Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap mendukung stabilitas ekonomi dalam jangka panjang (Rahman et al., 2026). Artikel ini bertujuan untuk membedah secara mendalam melalui tinjauan literatur mengenai bagaimana sinergi antara kebijakan fiskal dan instrumen APBN mampu menciptakan stabilitas ekonomi dan mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Dasar dan Filosofi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal pada hakikatnya merupakan strategi ekonomi makro yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur lintasan perekonomian melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara secara sistematis (Rahman et al., 2026). Sadono Sukirno dan buku Aziz (2024) menekankan bahwa kebijakan fiskal melibatkan langkah-langkah pemerintah dalam melakukan penyesuaian pada sistem perpajakan dan pengeluaran guna mempengaruhi intensitas kegiatan ekonomi nasional (Aziz et al., 2024). N. Gregory Mankiw menyoroti

penggunaan pajak dan pengeluaran negara sebagai alat untuk mempengaruhi kondisi perekonomian secara makro (Sufriadi et al., 2024; Rahman et al., 2026). Kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama dalam perekonomian, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi (Purba et al., 2024).

Instrumen dan Fungsi Strategis Fiskal

Pelaksanaan kebijakan fiskal didukung oleh instrumen-instrumen utama yang memiliki fungsi berbeda namun saling terintegrasi (Purba et al., 2024). Sebaliknya, ketika perekonomian mengalami tekanan inflasi atau overheating, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal kontraktif melalui pengurangan belanja negara atau peningkatan pajak untuk mengendalikan permintaan agregat (Aruan et al., 2023). Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam mengatur dinamika perekonomian agar tetap berada pada kondisi yang stabil (Faoziah & Rifqi, 2025). Struktur APBN tersebut mencerminkan strategi pemerintah dalam mengelola keuangan negara guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional (Purba et al., 2024).

Struktur dan Signifikansi APBN dalam Pengelolaan Ekonomi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen fiskal paling nyata yang mendokumentasikan seluruh rencana keuangan pemerintah dalam satu tahun anggaran. APBN disusun melalui proses yang melibatkan lembaga legislatif untuk menjamin aspek transparansi dan akuntabilitas publik. Struktur APBN terdiri dari tiga komponen inti: pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan (Rahmayanti et al., 2025). Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mendukung pengembangan sektor-sektor strategis yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan produktivitas ekonomi, seperti sektor industri, teknologi, energi, serta sumber daya manusia (Huda et al., 2024; Irfan et al., 2026). Kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan keuangan negara, tetapi juga sebagai alat strategis dalam mengatur dinamika perekonomian, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Huda et al., 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Secara metodologis, studi literatur digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai penelitian sebelumnya sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terkait kebijakan fiskal, struktur APBN, dan perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional (Harahap et al., 2024). Sumber data penelitian berasal dari publikasi ilmiah. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, sintesis, dan

penarikan kesimpulan guna mengidentifikasi peran kebijakan fiskal dalam fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi (Harahap et al., 2024).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Instrumen Fiskal dalam Transformasi Ekonomi

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah dalam mengarahkan transformasi ekonomi nasional. Transformasi ekonomi dalam konteks pembangunan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup perubahan struktur ekonomi menuju sektor-sektor yang lebih produktif, inovatif, dan berdaya saing tinggi (Purba et al., 2024). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memainkan peran strategis dalam mendorong perubahan struktural tersebut. Instrumen fiskal seperti kebijakan perpajakan, belanja negara, serta berbagai insentif fiskal dapat digunakan untuk mendorong investasi pada sektor-sektor prioritas (Chintya & Lores, 2025). Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan investasi dan mempercepat proses industrialisasi sehingga dapat memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global (Safitri et al., 2025).

Berdasarkan hasil analisis literatur, kebijakan fiskal di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan, beralih dari sekadar instrumen administratif menjadi mesin penggerak utama dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Instrumen pajak, sebagai komponen utama penerimaan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memegang peranan ganda yang sangat krusial. Pajak berfungsi sebagai fungsi anggaran (*budgetary*) untuk membiayai kebutuhan pembangunan, namun di sisi lain, ia menjalankan fungsi pengatur (*regurand*) untuk mengendalikan ekonomi (Mustari & Rahmat, 2026). Transformasi paradigma fiskal ini menunjukkan bahwa pemerintah kini lebih adaptif dalam merespons ketidakpastian global dengan menciptakan sistem perpajakan yang lebih inklusif dan transparan untuk mendorong kemandirian (Fitriania et al., 2026). Penerapan instrumen pengeluaran pemerintah (*government spending*) juga menunjukkan efektivitas yang nyata dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui efek pengganda (*multiplier effect*) (Huda et al., 2024; Buke et al., 2025).

Implementasi Fungsi APBN dalam Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan

Selain berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi, APBN juga memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam teori ekonomi publik, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengurangi ketimpangan ekonomi melalui kebijakan distribusi yang adil. Melalui APBN, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya

fiskal untuk berbagai program sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata (Purba et al., 2024). Salah satu bentuk implementasi fungsi distribusi APBN adalah melalui berbagai program perlindungan sosial yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (Huda et al., 2024). Program-program tersebut memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi, terutama pada masa ketidakpastian ekonomi

Penyusunan struktur APBN yang matang mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjalankan fungsi distribusi secara konsisten (Putra et al., 2025). Berdasarkan analisis literatur, instrumen subsidi dan bantuan sosial merupakan mekanisme fiskal yang paling efektif dalam memitigasi risiko kesenjangan sosial yang tajam. Pemberian bantuan sosial yang terukur tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman bagi kelompok masyarakat rentan, tetapi juga menjaga tingkat konsumsi rumah tangga tetap stabil, yang merupakan komponen terbesar dalam pembentuk ekonomi nasional. Relevansi kebijakan fiskal kontemporer sangat menekankan pada pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran transfer daerah dan dana desa agar pembangunan tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan saja, melainkan merata hingga ke pelosok daerah (Huda et al., 2024). Selain fungsi distribusi, fungsi alokasi dalam APBN berperan penting dalam penyediaan barang publik yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh mekanisme pasar bebas (Sufriadi et al., 2024). Alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan, yang minimal mencapai persentase tertentu dari total belanja negara, merupakan investasi pada sumber daya manusia yang akan menentukan daya saing bangsa di masa depan (Sari et al., 2022).

Dinamika Stabilitas Ekonomi dan Manajemen Defisit Anggaran

Stabilitas ekonomi merupakan salah satu tujuan utama dari kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah. Stabilitas ekonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan pengeluaran negara. Ketika pengeluaran negara melebihi penerimaan negara, maka akan terjadi defisit anggaran yang perlu dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas ekonomi (Mustari & Rahmat, 2026). Defisit anggaran sering digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama ketika perekonomian mengalami perlambatan. Melalui peningkatan belanja negara, pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat sehingga mampu mendorong aktivitas ekonomi dan menciptakan lapangan kerja (Aruan et al., 2023).

Fungsi stabilisasi dalam kebijakan fiskal menjadi instrumen kritis dalam menghadapi guncangan ekonomi, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal kontra-siklikal (*counter-cyclical*) untuk meredam dampak

volatilitas ekonomi. Saat pertumbuhan ekonomi melambat, pemerintah cenderung menerapkan kebijakan ekspansif dengan memperlebar defisit anggaran guna membiayai belanja yang mampu menstimulasi permintaan domestik. Sebaliknya, saat ekonomi mengalami kepanasan (*overheating*) yang ditandai dengan inflasi tinggi, kebijakan fiskal kontraktif diambil untuk menarik kelebihan likuiditas dari pasar (Bahtiar et al., 2025). Namun, pengelolaan defisit anggaran ini memerlukan kehati-hatian yang tinggi agar tidak menimbulkan beban utang yang memberatkan generasi mendatang. Analisis terhadap utang pemerintah menunjukkan bahwa selama rasio utang terhadap PDB tetap berada dalam batas aman dan penggunaan dana utang dialokasikan untuk kegiatan produktif, maka kebijakan fiskal tetap dianggap kredibel (Anwar et al., 2026).

Resiliensi ekonomi nasional sangat bergantung pada kemampuan otoritas fiskal dalam mengelola risiko pembiayaan secara berkelanjutan. Diversifikasi instrumen pembiayaan, seperti penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang melibatkan investor domestik, merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan asing dan memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar (Surdikina et al., 2025). Pembahasan ini menggarisbawahi bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya dicapai melalui angka pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga melalui kualitas pertumbuhan yang didukung oleh fiskal yang sehat dan berkelanjutan. (Mustari & Rahmat, 2026).

Sintesis Hubungan Fiskal dan APBN terhadap Ketahanan Nasional

Kebijakan fiskal dan struktur APBN tidak hanya memiliki implikasi terhadap stabilitas ekonomi, tetapi juga memiliki hubungan yang erat dengan ketahanan nasional. Ketahanan ekonomi merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas nasional secara keseluruhan. Negara yang memiliki sistem fiskal yang kuat dan pengelolaan anggaran yang baik cenderung lebih mampu menghadapi berbagai guncangan ekonomi global. (Bahtiar et al., 2025). Integrasi antara filosofi kebijakan fiskal dan pelaksanaan operasional APBN membentuk sebuah ekosistem tata kelola ekonomi yang kokoh. Dari perspektif teoretis yang dikemukakan oleh para ahli seperti Musgrave dan Mankiw, terlihat bahwa APBN adalah bentuk nyata dari kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat, di mana setiap rupiah yang dikumpulkan dari masyarakat dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan. Pembahasan ini membuktikan bahwa kebijakan fiskal tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya dukungan struktur anggaran yang transparan dan akuntabel (Pasaribu et al., 2025).

Terakhir, tantangan global di masa depan menuntut fleksibilitas fiskal yang lebih tinggi. Munculnya isu-isu baru seperti perubahan iklim dan transformasi energi hijau mengharuskan kebijakan fiskal untuk mulai mengadopsi prinsip *green budgeting* dalam struktur APBN. Hal

ini berarti pemerintah tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi konvensional, tetapi juga memberikan insentif bagi investasi ramah lingkungan dan mengenakan beban fiskal bagi aktivitas ekonomi yang merusak ekosistem. Sinergi antara kebijakan fiskal yang adaptif dengan APBN yang visioner akan menjadi kunci bagi Indonesia dalam menghadapi persaingan ekonomi global yang semakin kompetitif (Febriansyah et al., 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan pajak dan pengeluaran pemerintah. APBN menjadi alat utama untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi serta membantu menghadapi tantangan ekonomi global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, pemerintah perlu memperkuat sistem perpajakan melalui digitalisasi, meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran, serta mengembangkan kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata

DAFTAR REFERENSI

- Alfidyah, M. (2025). Dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap stabilitas ekonomi nasional. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 30–37.
- Ambarita, C. F., & Siregar, A. R. S. (2025). Efektivitas kebijakan fiskal pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ditinjau dari teori Keynesian. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 7, 9–11. <https://doi.org/10.37034/infec.v7i4.1283>
- Anwar, M., Syafitri, N. A., & Apriliza, S. (2026). Analisis dampak hutang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia: Pengujian teori debt overhang. *Journal of Golden Generation Economic*, 1(2), 450–462.
- Aruan, N. I. M., Hutagalung, I., & Purba, B. (2023). Analisis dampak teori Keynes dalam mengatasi krisis. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.62017/jimea.v1i1.78>
- Aziz, A., Restu, M. A., Apriliani, R., Aldi, M., Maulidia, M., Asy'ari, A., Sulistiawati, S., Marhaendi, A., Amelia, R., Nurmayanti, N., Renaldi, R., Karinah, S., Khoiri, Z., Barokah, S., Kholifa, A., Kosasih, K., Lindani, L., Rohman, R., Farhan, M., ... Ramdan, A. S. (2024). *Ekonomi makro Islam*. CV. Adanu Abimata.
- Bahtiar, A. A., Pandini, M. C., Tsalitsa, S., & Meidiyustiani, R. (2025). Pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi keuangan di Indonesia Arnetta. *Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonom*, 20(2).
- Buke, J. L., Suna, A. E. D., & Mariana, M. R. R. (2025). Ekonomi Indonesia mengatasi tantangan, menjaga stabilitas. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), 965–970. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i3.1177>
- Chintya, C., & Lores, L. (2025). Analisis penerapan pajak karbon dan dampaknya terhadap industri manufaktur di Indonesia. *Department of Digital Business Journal of Artificial*

- Intelligence and Digital Business* (Riggs), 4(3), 2884–2890. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2409>
- Faoziah, S., & Rifqi, R. (2025). Peran pemerintah dalam perekonomian Indonesia: APBN, fiskal dan moneter. *Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan*, 1(4), 167–175.
- Febriansyah, M. I., Putra, A. K. S., Rafii, M. T., & Pangestoeti, W. (2025). Research review. *Research Review Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(1), 633–640. <https://doi.org/10.54923/researchreview.v4i1.200>
- Fitriania, F., Yulistiyonob, H., & Ariani, A. (2026). Transformasi paradigma fiskal Indonesia dalam konteks pembangunan dan kemandirian nasional. *Jurnal Ekonomika Transformasi Paradigma Fiskal Indonesia*, 16(3), 447–460.
- Gumilar, A., Hakim, A. L., Suryaningsih, M., Silvia, A., Kaswoto, J., Puspitasari, R., Humairoh, H., Saputra, A. R., Junaidi, A., Sudarmanto, E., Wulandjani, H., & Astuti, P. R. M. S. Y. (2025). *Pengantar ilmu ekonomi*. Penerbit Minhaj Puskata.
- Harahap, S. G., Masengi, M. C., Sapulette, R. O., & Fitriana, F. (2024). *Buku referensi metode penelitian panduan komprehensif*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Hasanah, L. L. El, Dassucik, D., & Farida, I. (2025). *Pengantar ekonomi pembangunan: Strategi menuju negara berkembang*. Penerbit Tahta Media Group.
- Huda, R. A., Puspita, R. A., Hasanah, S. N., & Malik, A. (2024). Sosial di Indonesia sebagai negara berkembang. *Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 7(2), 189–201.
- Irfan, D., Lamali, L., & Hasim, H. (2026). Dampak kebijakan fiskal terhadap stabilitas ekonomi pasca pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 8(3), 275–282.
- Luange, J., & Tiakoly, K. (2025). Peran UMKM dalam menggerakkan ekonomi Indonesia. *Iqra: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 4(2), 1–13.
- Mujasmara, F. D., Panggabean, T. T. R., Muliana, R. S., Nugrahadi, R. W., & Rinaldi, M. (2023). Peran kebijakan fiskal terhadap perekonomian di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 2807–4246.
- Mustari, N. H., & Rahmat, R. (2026). Peran APBN terhadap ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global dan pengelolaan utang negara. *Jurnal Jumanis-Baja*, 08(1), 60–76.
- Pasaribu, J. R. S., Runi, N. A., Situmorang, R. M., Lubis, P. K. D., & Matondang, K. A. (2025). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 12(2), 433–440.
- Purba, B., Anindya, D. A., Abdullah, S., Handiman, U. T., Zulham, T., David Yanto Daniel Mahulae Muliana, M., Yavishan, Y., Adi Papa Pandarangga Fajrillah, F., & Tamrin, M. (2024). *Ekonomi publik: Teori dan penerapan kebijakan fiskal*. Yayasan Kita Menulis.
- Putra, S. K., Setian, W., Astuti, D., & Pangestoeti, W. (2025). Analisis peran pemerintah dalam perekonomian nasional melalui tiga fungsi utama fiskal: Alokasi, distribusi, dan stabilitas. *Kampus Akademik Publishing Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(6), 408–416. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5380>

- Rahman, A., Hakim, S. H., & Fitri, N. (2026). Kebijakan fiskal untuk pembangunan berkelanjutan: Integrasi perencanaan dan penganggaran di Indonesia. *Widina Media Utama*.
- Rahmayanti, V., Syahraeni, S., Nurham, M., Kamiruddin, K., & Sahaka, A. (2025). Menyelami APBN Indonesia: Potret anggaran dan analisis perkembangan dari periode ke periode. *Ikraith-Ekonomika*, 8(1), 328–337.
- Safitri, N., Saputri, Y. O., & Sanjaya, I. M. (2025). Analisis peran investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di era globalisasi. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11), 1–13. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i11.6986>
- Sari, A. I. C., A'ini, Z. F., & Tukiran, M. (2022). Pengaruh anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 9(2), 127–136. <https://doi.org/10.30998/jabe.v9i2.15082>
- Sufriadi, D., Boari, Y., Mendrofa, S. A., Simbolon, T. R., Setiyarti, T., Kristianto, A. H., Kafabih, A., Utami, H. W., Muttaqin, E. I., & Harsono, I. (2024). *Ekonomi makro: Teori dan kebijakan*. CV Lauk Puyu Press.
- Surdikina, N., Tompul, R. B., Sianipar, S. B., & Santika, S. (2025). Strategi pengelolaan utang negara: Menjaga stabilitas. *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(1), 162–173. <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i1.41>
- Syadza, H. 'Azizah, Gusnawati, W. A., & Ardiningrum, L. (2021). Tinjauan atas langkah pemerintah dalam mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal terkait APBN. *Jurnal Ilmiah Bidang Keuangan Negara*, 1(2), 75–82. <https://doi.org/10.31092/jaa.v1i2.1317>
- Tarina, U., Febrian, M. R., Cahyaning, I., & Nurcahya, W. F. (2024). Efektivitas penyerapan anggaran belanja negara dalam pemilihan umum. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(5), 785–797. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i5.885>